

LAPORAN PENELITIAN INSTITUSIONAL PPs UNY
TAHUN ANGGARAN 2018



Judul:
PARADIGMA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
PROGRAM PASCASARJANA DI INDONESIA ERA REFORMASI

Oleh

Dr. Samsuri, S.Pd., M.Ag./NIP. 19720619 200212 1 001
Dr. Suharno, M.Si./NIP. 19680417 200003 1 001
Dr. Mukhamad Murdiono, S.Pd., M.Pd./NIP. 19780630 200312 1 002
R Samidi/NIM. 17730251001
Verbena Ayuningsih Purbasari/NIM. 17730251015

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2018

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN INSTITUSIONAL PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Judul Penelitian : PARADIGMA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PROGRAM PASCASARJANA DI INDONESIA ERA REFORMASI
2. Ketua Peneliti :
- a. Nama lengkap : Dr. Samsuri, S.Pd., M.Ag.
- b. Jabatan : Lektor Kepala
- c. Program Studi : Pend. Kewarganegaraan - S1
- d. Alamat : Perum Sambiroto Asri A.03, RT.09/ RW.04 Purwomartani, Kalasan, Sleman, 55571
- e. Telepon : +6281805950338
- f. e-mail : samsuri@uny.ac.id
3. Bidang Keilmuan : Pendidikan
4. Skim : Penelitian Institusional 2018
5. Tema Penelitian Payung : Kurikulum Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi
6. Sub Temap Penelitian Payung : Pendidikan Berkarakter dan Berdaya Saing
7. Kelompok Peneliti : -
- | No | Nama | NIP | Bidang Keahlian |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Dr. Suharno, S.Pd., M.Si. | 196804172000031001 | Kebijakan Publik |
| 2. | Dr. Mukhamad Murdiono, S.Pd, M.Pd. | 197806302003121002 | SBM PPKn |
8. Mahasiswa yang terlibat :
- | No | Nama | NIM | Prodi |
|----|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1. | R. Samidi | 17730251001 | Pend. Pancasila & Kewarganeg |
| 2. | Verbena Ayuningsih Purbasari | 17730251015 | Pend. Pancasila & Kewarganeg |
9. Lokasi Penelitian : Bandung, Surakarta, dan Malang
10. Waktu Penelitian : 16 April 2018 s/d 26 Oktober 2018
11. Dana yang disetujui : Rp. 20.000.000,00

Mengetahui,
Kaprodi PPKn,


Dr. Suharno, M.Si.
NIP 19680417 200003 1 001

Yogyakarta, 27 Oktober 2018
Ketua Tim Peneliti


Dr. Samsuri, M.Ag.
NIP 19720619 200212 1 001

Mengetahui,
Direktur PPs UNY


Prof. Dr. Marsigit, M.A.
NIP. 19570719 198303 1 001



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) memetakan pengembangan kajian ilmu pendidikan kewarganegaraan baik dalam nomenklatur Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) maupun Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di program pascasarjana di perguruan tinggi di Indonesia semenjak era reformasi; dan, (2) memetakan pengembangan kompetensi lulusan Program Studi PPKn/PKn di perguruan tinggi di Indonesia semenjak era reformasi.

Metode penelitian dilakukan secara komparatif dengan pendekatan kualitatif terhadap program pascasarjana penyelenggara Program Studi PPKn/PPKn di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan secara purposif terhadap Program Studi PPKn PPs Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Negeri Malang, serta Program Studi PPKn Sekolah Pascasarjana UPI Bandung. Analisis data dilakukan secara induktif, dan disajikan secara deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, kajian keilmuan pendidikan kewarganegaraan baik dalam nomenklatur Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) maupun Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di program pascasarjana di perguruan tinggi di Indonesia terdapat perbedaan dan persamaan penyelenggaraan. *Persamaan* yang khas yakni bahwa kajian dilakukan untuk menghasilkan lulusan program magister/doktor sesuai dengan visi, misi dan tujuan penyelenggaraannya dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). *Perbedaan* tampak dalam penyelenggaraan kajian keilmuan pendidikan kewarganegaraan karena faktor sejarah pembukaan prodi, karakteristik awal perguruan tinggi, ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana program pendidikan pascasarjana. *Kedua*, pengembangan kompetensi lulusan bercorak akademik dan sejalan tuntutan kebutuhan lapangan kerja serta dunia keilmuan kontemporer.

BAB I. PENDAHULUAN

Kuatnya pengaruh perubahan politik nasional terhadap kebijakan pendidikan kewarganegaraan di tiap negara secara eksplisit diperkuat oleh kajian Cogan (1998) yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat dipergunakan sebagai alat untuk memelihara kepentingan kekuasaan rejim dalam bentuk indoktrinasi serta pembentukan hegemoni ideologis (Cogan, 1998: 5). Namun sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan juga dapat menjadi sarana penting untuk memelihara dan mentransformasikan nilai-nilai politik dari suatu sistem politik melalui proses pendidikan di sekolah (Dawson, Prewitt, dan Dawson, 1977: 27).

Sejak memasuki era reformasi, kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Studi Samsuri (2010; 2011) menegaskan bahwa perubahan kebijakan pendidikan kewarganegaraan pasca-Orde Baru sangat kental dengan suasana kebatinan yang mendasari kebijakan nasionalnya, yakni semangat reformasi sebagai cita-cita dan pembangunan nasional yang lebih baik dibanding periode rezim sebelumnya.

Di level perguruan tinggi, perubahan kebijakan pendidikan nasional seiring dengan dinamika politik nasional ditanggapi secara akademik melalui maraknya kajian pendidikan kewarganegaraan di tingkat program magister dan doktor. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dianggap telah memelopori kajian pendidikan kewarganegaraan di level program pascasarjana mulai tahun akademik 2005 untuk jenjang magister dan program doktor semenjak tahun akademik 2008 dengan nomenklatur Prodi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Seiring

waktu, bermunculan pula prodi-prodi baru di jenjang magister di sejumlah Program Pascasarjana dengan nomenklatur Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) semenjak tahun akademik 2014.

Pertanyaannya, adakah perbedaan paradigma kajian keilmuan dan kompetensi lulusan antara prodi program pascasarjana dengan nomenklatur PPKn dan PKN? Secara yuridis formal, Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebut dengan tegas adanya dua kajian yang terpisah antara Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai nomenklatur wajib di pendidikan tinggi khususnya di program diploma dan sarjana. Di sisi lain, program sarjana pendidikan di Strata Satu hanya dikenal dengan nomenklatur Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di semua Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. memetakan pengembangan kajian ilmu pendidikan kewarganegaraan baik dalam nomenklatur Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) maupun Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di program pascasarjana di perguruan tinggi di Indonesia semenjak era reformasi;
2. memetakan pengembangan kompetensi lulusan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di perguruan tinggi di Indonesia semenjak era reformasi;
3. mengkonstruksi paradigma Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di program pascasarjana di perguruan tinggi di Indonesia yang sejalan dengan visi nasional maupun idealitas keilmuan pendidikan kewarganegaraan secara universal.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Ruud Veldhuis (1997: 8), tujuan PKN ialah untuk merangsang partisipasi aktif warga negara dalam masyarakat sipil (*civil society*) dan dalam pembuatan keputusan politik di dalam suatu (sistem) demokrasi konstitusional. Mengapa partisipasi menjadi penting dalam PKN? Veldhuis (1997: 8) berpendapat bahwa partisipasi dan integrasi (secara sosial dan politik) dari para warga negara menjadi dasar yang penting. Untuk menjadi demokrat sejati, warga negara yang aktif dan terintegrasi secara sosial tidaklah dilahirkan, tetapi ia diciptakan (direproduksi) dalam suatu proses sosialisasi. Singkatnya, demokrasi harus dipelajari dan perlu dipelihara, dimana para pendidik *civic* dan politik serta institusi profesional yang terkait harus turut bertanggung jawab.

Karakter warga negara ideal yang memiliki watak demokratis, “good citizen,” terdapat beberapa indikator penyebutannya. Jika ditilik dari komponen pendidikan kewarganegaraan demokratis, John Patrick (1999: 33) berpendapat bahwa ada empat komponen atau kategori pokok yang dapat dikaji secara beragam oleh para pendidik PKN dari berbagai negara. Keempat komponen itu ialah (1) pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan demokrasi; (2) kecakapan kognitif dari kewarganegaraan demokratis; (3) kecakapan partisipasi dari kewarganegaraan demokratis; dan, (4) keutamaan karakter kewarganegaraan yang demokratis.

Pembaharuan pendidikan kewarganegaraan dari era Orde Baru ke masa transisi era reformasi pun tidak luput dari pengaruh perubahan percaturan politik nasional. Pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P4, yang selama Orde Baru menjadi materi pokok PMP dan PPKn, telah menjadi salah satu faktor penting perubahan paradigma pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Faktor lainnya, pergeseran orientasi pendidikan berbasis *subject matters* kepada pendidikan berbasis kompetensi pun turut mempengaruhi arah kebijakan pendidikan kewarganegaraan. Pengalaman selama Orde Baru menumbuhkan

kesadaran arti penting pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik terhadap hak dan kewajiban siswa sebagai warga negara. Tetapi, pendidikan kewarganegaraan pasca Orde Baru diharapkan mampu membangun warga negara muda yang memiliki kecapakan dan karakter kewargaan yang ideal, yang diperlukan dalam sistem politik demokratis di Indonesia.

Pembaharuan pendidikan nasional semenjak pengesahan UU RI No. 20 Tahun 2003 di Indonesia makin jelas arahnya. Arah kejelasan tersebut yang membedakan dengan produk hukum sejenis sebelumnya tentang pendidikan nasional ialah diamanatkannya pembentukan standar nasional pendidikan. Dalam Bab IX Pasal 35 UU RI No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan juga digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Setelah pencabutan Ketetapan MPR tentang P4, kajian Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah menimbulkan persoalan. Kajian Pancasila yang “kering” sejak awal tampaknya sudah disadari, meski sudah ada dalam Standar Isi (SI) Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Kritik yang acapkali muncul terhadap SI Pendidikan Kewarganegaraan antara lain bagian kajian Pancasila secara eksplisit. Dari delapan ruang lingkup kajian PKn, materi Pancasila merupakan salah topik yang dibahas tersendiri mulai sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Upaya menghilangkan kajian Pancasila dalam SI Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sesuatu yang mustahil, hal yang absurd. Persoalannya bukan kepada seberapa eksplisit Pancasila ditonjol-tonjolkan sebagai materi Pendidikan Kewarganegaraan. Namun, seberapa fungsional Pancasila sebagai *great ought* kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi ruh dan jiwa pendidikan kewarganegaraan itu sendiri di Indonesia, untuk membedakannya dengan model sebelumnya di masa Orde Baru. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara betul-betul bermakna. Dari sinilah, pengembangan SI Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan Pancasila sebagai pancaran nilai yang aktual dan fungsional, tidak semata-mata menjadi rumusan normatif, dalam berbagai topik, meskipun ada satu topik khusus tentang Pancasila itu sendiri.

B. Politik Pendidikan Kewarganegaraan

Tidaklah keliru apabila dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan “...has also often reflected the interests of those in power in a particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than of education” (Cogan,1998:5). Hal ini menimpa pula dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, khususnya selama Orde Baru. Selama periode Orde Baru, pendidikan sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara menampakkan wujudnya dalam standarisasi karakter warga negara. yang disajikan dalam mata pelajaran PMP dan atau PPKn dengan memasukan secara membabi-buta tafsir Pancasila menurut P4. Pancasila direduksi menjadi 36 butir tafsir pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Di bidang pendidikan, konsekuensi P4 sebagai keharusan pedoman atau arah tingkah laku warga negara sangat membebani misi pendidikan kewarganegaraan dalam PMP maupun PPKn. Pada gilirannya, unsur normatif dan anti konflik terhadap perbedaan-perbedaan kehidupan di masyarakat cenderung dihindari bahkan dianggap tabu, karena P4 selalu menekankan keharmonisan, keseimbangan hidup dalam format kehidupan kekeluargaan yang menjadi *main ideas* kekuasaan Rejim Orde Baru.

Dari gambaran tersebut, nilai-nilai yang menjadi materi pokok pembelajaran PMP ataupun PPKn berasal dari “atas” (rejim yang sedang berkuasa), bukan dari kehendak masyarakat pendidikan (arus bawah). Konsekuensinya nilai-nilai yang menjadi model materi pembelajaran pun cenderung hipokrit dan jauh dari aspirasi ilmiah (keilmuan), sehingga PMP ataupun PPKn terkesan tidak jauh beda dengan mata pelajaran *Civics* atau pun Kewargaan Negara pada masa rejim Soekarno 1960an.

C. Pendidikan Program Pascasarjana

Program studi PKn/PPKn di level program magister dan doktor sejatinya memiliki visi sebagai *nation and character building*. Visi ini di Indonesia dikenal sebagai upaya meng-Indonesia-kan orang Indonesia. Meskipun secara formal seseorang sebagai warga negara Indonesia (WNI), namun karakternya sebagai bangsa Indonesia harus tetap dipertahankan, salah satunya melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan hadir untuk mendidik kebangsaan warga negara sebagai pendidikan kebangsaan yang sangat progresif, karena dalam pengembangan karakter kebangsaan tidak hanya sebatas *cultural nation* tetapi juga sebagai *political nation*.

Secara yuridis, Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No. 20 Tahun 2003 hanya menggunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan, setelah sebelumnya dalam UU RI No. 2 Tahun 1989 disebut pula Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional. Penamaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam UU RI No 20 Tahun 2003 sejalan dengan pemikiran akademis, bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semestinya memuat nilai-nilai dasar sebagai prasyarat kehidupan bersama yang dicita-citakan (*great ought*), yang meliputi ideologi, sistem pemerintahan sendiri, hak asasi manusia, dan *common grounds* berupa kebaikan bersama yang diakui bersama termasuk adat istiadat.

Arti penting PPKn tersebut membutuhkan tenaga pendidik kompeten dan handal sehingga dapat mengaktualisasikan visi, misi, dan tujuannya untuk membentuk warga negara Indonesia yang ideal, sebagaimana dimaksudkan dalam pembangunan pendidikan nasional itu sendiri. Ketersediaan tenaga pendidik Pendidikan Kewarganegaraan yang kompeten dan handal hanya dapat dicapai dengan ketersediaan institusi pendidikan yang memadai pula.

Secara formal, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di pendidikan dasar (SMP/MTs) dan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/MAK) mensyaratkan lulusannya memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007. Demikian pula, untuk dosen Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dan dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi memerlukan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional yang memadai dengan cara menempuh studi lanjutan di Program Pascasarjana Perguruan Tinggi.

Keterbatasan jumlah lembaga studi lanjutan pascasarjana yang linier dengan tuntutan kualifikasi akademik dan kompetensi keahlian guru/dosen Pendidikan Kewarganegaraan, menyebabkan pemilihan program studi terdekat di Program Pascasarjana Perguruan Tinggi menjadi jalan keluar yang dipilih, seperti di Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) PPs UNY, dan Prodi Pendidikan Dasar PPs Universitas Negeri Medan. Di luar program studi kependidikan, Program Studi Ketahanan Nasional di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia pun secara terang-terangan menyatakan bahwa tujuan program studi mereka ialah menghasilkan lulusan sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi jenjang S1 dan diploma untuk mata kuliah Kewarganegaraan/ Pendidikan Kewarganegaraan (Program Pascasarjana UNY, 2014).

Tuntutan peningkatan kualitas guru dan dosen Pendidikan Kewarganegaraan di seluruh wilayah Indonesia tersebut telah mendorong pendirian di PPs UNY. Ketersediaan sumber daya pendidik (dosen) di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY dipandang kompeten untuk mengelola program magister sesuai standard yang telah ditetapkan di bawah koordinasi PPs UNY. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana menjadikannya layak untuk menyelenggarakan pendidikan setingkat magister di UNY. Di Indonesia, sampai saat ini lembaga pendidikan tinggi yang telah menyelenggarakan Program Studi S2 (dan S3) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan baru di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Selama ini penyelenggaraan kajian Pendidikan Kewarganegaraan setingkat jenjang magister masih menjadi konsentrasi dari Prodi PIPS atau Pendidikan Dasar di program pascasarjana (“Program Studi Pendidikan Dasar Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan,” <http://pasca.unimed.ac.id>; “Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta,” <http://pps.uny.ac.id/pendidikan-ilmu-pengetahuan-sosial-s2>). Karena posisinya masih menjadi konsentrasi, maka fokus kajian dan kompetensi yang diharapkan kepada peserta didik dan lulusannya pun belum memadai seperti yang diidealkan (Program Pascasarjana UNY, 2014).

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam tahun anggaran 2018. Penelitian dilaksanakan di Bandung, Surakarta dan Malang, meliputi studi banding pengembangan kajian dan kompetensi lulusan Program Studi PPKn/PKn di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, serta Universitas Negeri Malang (UM) sebagai simpul data.

B. Desain Penelitian

Sebagai bentuk penelitian deskriptif kualitatif, maka dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi model pengembangan kajian kelimuan dan kompetensi lulusan PPKn/PKn PPs/SPs di tiga perguruan tinggi.
2. Memotret pengalaman pengembangan pengembangan kajian kelimuan dan kompetensi lulusan PPKn/PKn PPs/SPs di tiga perguruan tinggi.
3. Memetakan paradigma pengembangan kajian kelimuan dan kompetensi lulusan PPKn/PKn PPs/SPs di tiga perguruan tinggi.
4. Memproduksi naskah akademik paradigma pengembangan kajian kelimuan dan kompetensi lulusan PPKn/PKn PPs/SPs berdasarkan temuan di tiga perguruan tinggi.

C. Sumber Data dan Subjek Penelitian

Sumber data penelitian ini, mengikuti klasifikasi Suharsimi Arikunto (2002), adalah *paper* dan *person*. Paper yang dimaksud adalah literatur-literatur/kepuustakaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan sumber data berupa person dapat juga disebut sebagai subjek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

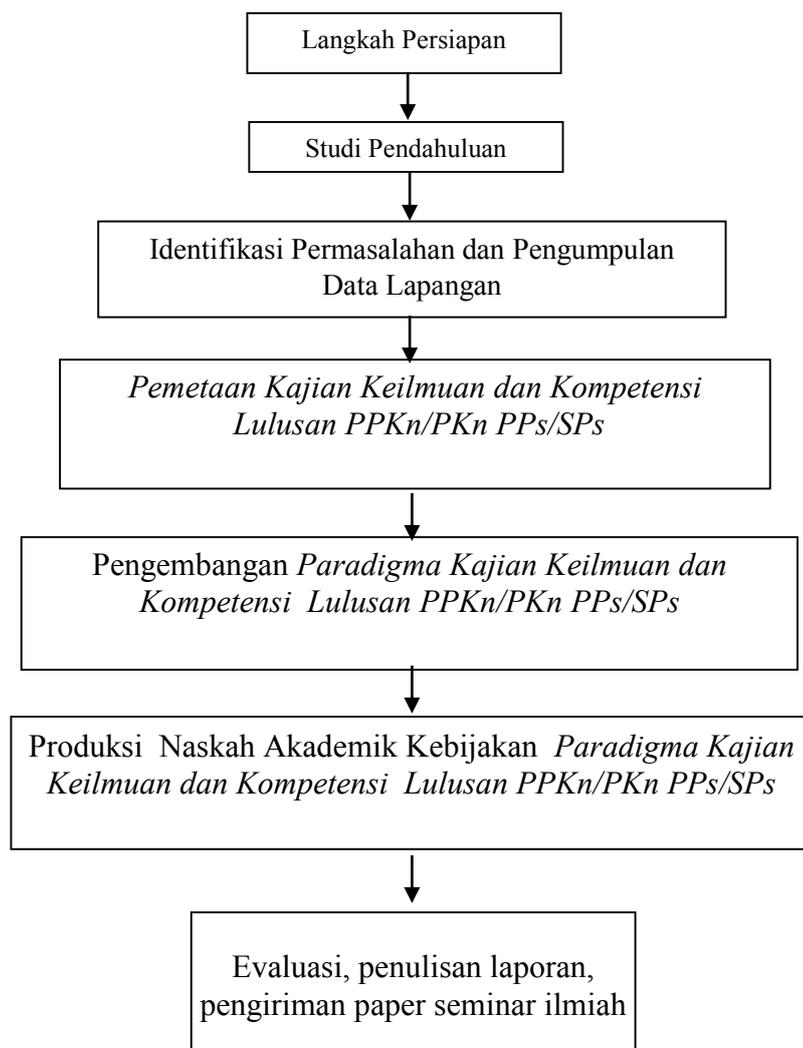
Secara umum teknik pengumpulan dan analisis data dibagi menjadi dua kelompok, yaitu studi lapangan di tiga perguruan tinggi yang ditentukan secara purposif dan *desk study*. Studi lapangan meliputi:

1. Wawancara terhadap ketua prodi, dosen dan mahasiswa PPKn/PKn PPs/SPs.
2. Dokumentasi naskah Kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Semester Prodi-prodi PPKn/PKn PPs/SPs.

Desk study dalam penelitian ini meliputi :

1. Studi literatur, teknik pemanfaatan data-data sekunder serta data tertulis lainnya mengenai kompetensi kewarganegaraan berbasis nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal masyarakat multikultural di Indonesia melalui program persekolahan.
2. *Peer Discussion* (PD) untuk memperkokoh konstruksi analitik dan teoretik hasil kajian analisis data sementara.

E. Tahapan Penelitian



BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Program Pascasarjana Perguruan Tinggi

a. Universitas Negeri Malang

Kurikulum Program Magister terdiri atas tiga komponen, yaitu (a) Matakuliah Umum (MKU): minimum 4 sks; (b) Matakuliah Dasar Keahlian (MKDK): minimum 4 sks; dan (c) Matakuliah Keahlian (MKK) , mencakup sejumlah MK Spesialisasi Bidang Studi, MK Proses Belajar-Mengajar Bidang Studi (PBMBS), MK Pembentukan Keahlian Bidang Studi (PKBS), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), dan Tesis.

b. Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Prodi PPKn Pascasarjana UNS diselenggarakan berdasarkan SK MENRISTEKDIKTI RI No. 411/KPT/2016 sebagai bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodi ini pertama kali didirikan pada tahun 2017 dengan tujuan untuk meresap alumni PPKn S1 di seluruh Indonesia supaya memiliki pengetahuan keilmuan PKn yang mendalam.

Pada dasarnya, mata kuliah yang diselenggarakan oleh prodi PPKn Pascasarjana UNS dikembangkan berdasarkan substansi materi keilmuan PKn secara umum. Substansi materi mencakup objek kajian politik, moral, hukum, dan pendidikan. Kemudian, objek kajian tersebut dihubungkan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh prodi PPKn Pascasarjana UNS. Capaian pembelajaran mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan berdasarkan pada Standar Nasional Dikti. Capaian pembelajaran dirumuskan ke dalam tiga ranah, yaitu: pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang meliputi keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Prodi PPKn Pascasarjana UNS masih menggunakan kurikulum awal sesuai yang dicantumkan dalam borang online pada saat mengusulkan penyelenggaraan prodi baru. Kurikulum prodi PPKn Pascasarjana UNS disusun dengan mempertimbangkan aspek tujuan, cakupan dan kedalaman materi yang mendorong terbentuknya kompetensi lulusan sesuai dengan standar capaian pembelajaran yang telah dirumuskan oleh Dikti. Selain itu, kurikulum yang digunakan mengacu pada level 8 KKNI yang diharapkan dapat membentuk kompetensi lulusan yang menguasai filosofi keilmuan pada ranah pengetahuan dan keterampilan bidang ilmu pendidikan dengan karakteristik capaian pembelajaran seperti berikut: 1) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; 2) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; dan 3) Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Kemudian, kurikulum dijabarkan menjadi satuan-satuan kecil berupa mata kuliah sebagai proses interaksi pembelajaran yang akan membentuk capaian pembelajaran. Kurikulum prodi PPKn Pascasarjana UNS dirancang dengan masa studi selama empat semester dengan beban SKS sebanyak 44 SKS. Struktur kurikulum terdiri dari sebaran mata kuliah dasar, mata kuliah keahlian wajib dan mata kuliah keahlian pilihan. Mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi tersebut antara lain mata kuliah dasar yang terdiri dari Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Teori Kewarganegaraan, Hukum dan Konstitusi, dan Teori Dan Landasan PKn. Mata kuliah keahlian wajib terdiri dari mata kuliah Sistem Demokrasi, Perbandingan Hukum Kewarganegaraan, Kewarganegaraan Multikultural, PKn kurikuler, PKn Kemasyarakatan, Pendidikan Moral, Inovasi Pendidikan, PKn Perspektif Internasional,

Pendidikan Politik, Tesis I (Seminar dan Ujian Proposal), Tesis II (Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi), Tesis III (Seminar Hasil Riset dan Karya Publikasi), dan Tesis IV (Ujian Tesis). Sedangkan mata kuliah keahlian pilihan terdiri dari mata kuliah Ekonomi Pancasila, Etika Politik, Pancasila dan Ideologi Politik Kontemporer, Ekologi Kewarganegaraan, Perkembangan HAM, dan Kewarganegaraan Digital.

Penyelenggaraan prodi PPKn Pascasarjana UNS yang memasuki tahun kedua sejak tahun 2017 ini memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 18 mahasiswa untuk angkatan 2017 dan 9 mahasiswa untuk angkatan 2018. Penurunan jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun 2018 dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh prodi untuk mengetatkan sistem seleksi bidang Bahasa Inggris agar menghasilkan input mahasiswa yang berkualitas. Prodi ini memiliki 9 staf pengajar/dosen yang terdiri dari 7 dosen yang berkualifikasi pendidikan PKn lulusan UPI Bandung, 1 dosen luar prodi dengan kualifikasi Pendidikan Nilai, dan 2 dosen/guru besar yang telah purna tugas dengan kualifikasi pendidikan masing-masing dari Pendidikan Olahraga dan Teknologi Pendidikan.

Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh prodi PPKn Pascasarja UNS adalah strategi yang secara umum digunakan oleh dosen untuk memberi kuliah maupun penugasan kepada mahasiswa. Tugas akhir mata kuliah masih berupa makalah yang harus dikumpulkan pada akhir semester.

Discovery Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan oleh prodi Pascasarjana UNS. Model Discovery Learning saat ini digunakan pada mata kuliah Hukum dan Konstitusi yang diampu oleh Dr. Dewi Gunawati, S. H, M.Hum dan mata kuliah Teori dan Landasan PKn yang diampu oleh Dr. Triana Rejekiningsih, S.H.,KN., M.Pd. Teknis penggunaan model ini antara lain dengan memberi tugas kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi dari lapangan yang sesuai dengan bidang mata kuliah.

Sebagai prodi baru, ada ciri khas yang ingin dibtunjukkan oleh prodi PPKn Pascasarjana UNS agar berbeda dengan prodi PPKn universitas lain. Prodi ini dibangun selain sesuai dengan kajian keilmuan PKn, juga sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat Surakarta. Adapun keunggulan yang dimiliki oleh prodi ini antara lain: 1) melakukan mata kuliah pakar setiap tahun sekali dengan mengundang pembicara dari dalam dan luar negeri; 2) seminar nasional/internasional; 3) dosen yang memiliki kepakaran dalam bidangnya masing-masing; 4) perpustakaan yang memadai; 5) laboratorium PPKn; dan 6) melakukan kerjasama dengan lembaga universitas dalam dan luar negeri. Kendala yang dialami oleh prodi PPKn Pascasarjana UNS sebagai prodi baru antara lain belum maksimalnya koordinasi antara dosen dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menunjang kompetensi lulusan serta belum adanya output penelitian yang dilakukan oleh dosen.

Sebagai prodi baru, prodi PPKn Pascasarjana UNS tetap melakukan evaluasi dalam rangka menertibkan manajemen prodi. Evaluasi dilakukan dalam hal rencana untuk merekonstruksi ulang visi dan misi prodi agar kualitas prodi meningkat. Selain itu, evaluasi dilakukan dalam hal pembelajaran dengan teknis pemberian instrumen angket yang harus diisi oleh mahasiswa melalui sistem Siakad untuk menjamin kualitas mengajar dosen selama perkuliahan.

Prodi PPKn Pascasarjana UNS menetapkan profil lulusan agar sesuai dengan road map perkembangan kajian keilmuan PKn. Profil lulusan yang diharapkan antara lain: sebagai guru bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sebagai dosen bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sebagai peneliti bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan sebagai pengabdian bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Dalam rangka membentuk output lulusan yang berkualitas, prodi PPKn Pascasarjana UNS memiliki beberapa kebijakan dan kegiatan pendukung. Pertama, memberikan beasiswa selama empat semester bagi lulusan S-1 PPKn UNS yang lulus dengan nilai cumlaude dan lulus dengan IPK minimal 3.3 yang memiliki artikel yang diterbitkan dalam jurnal terindeks Scopus. Kedua, menyelenggarakan kuliah umum dengan mendatangkan beberapa pakar/ahli dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seperti Prof. Freddy K. Kalidjernih. Ketiga, mengadakan peninjauan kerjasama dengan Universitas Bruneri Darrusalam. Keempat, mengadakan Riset Group sejak tahun 2018 dengan melibatkan mahasiswa. Kelima, merencanakan kerjasama dengan Tim Pengembang Kurikulum dan Tim Penjamin Mutu Pendidikan.

c. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

Pada awalnya, prodi PPKn Pascasarjana UPI berdiri dan mulai menerima mahasiswa pada tahun 2006 dengan berdasarkan pada SK Rektor yang telah diajukan sejak tahun 2015. Kurikulum yang digunakan oleh prodi ini telah mengalami proses review sebanyak 3 kali sejak kurikulum awal diberlakukan. Pada tahun 2018, UPI berencana menerapkan kurikulum baru akan tetapi rencana tersebut belum mendapat persetujuan dari senat akademik. Kemudian, rencana penggunaan kurikulum baru tersebut diharapkan akan terlaksana pada tahun 2019. Pada saat Prof. Sapriya menjadi Ketua Prodi PPKn Pascasarjana UPI, kurikulum yang berlaku terdiri dari mata kuliah kekhasan universitas, mata kuliah SPS, mata kuliah wajib prodi/keahlian prodi, dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah yang menjadi ciri khas universitas tersebut yakni Filsafat Ilmu dan Landasan Pendidikan. Kemudian, ada mata kuliah ke-SPS-an, yaitu mata kuliah Metode Penelitian dan Statistika Terapan. Adapun mata kuliah wajib prodi/keahlian prodi terdiri dari 14 sks. Sedangkan untuk mata kuliah pilihan komposisinya *fifty-fifty* dengan mata kuliah wajib prodi/keahlian prodi. Kurikulum prodi PPKn Pascasarjana UPI mengacu kepada visi misi universitas dan SPS. Intinya terletak pada konsep keunggulan dan kepeloporan prodi PPKn Pascasarjana UPI, dan fokusnya terletak pada dua hal yakni: 1) Mencetak calon pendidik pada tingkat universitas dan 2) Mencetak ahli PPKn dalam bingkai pribadi yang memiliki perasaan cinta tanah air dan berjiwa Pancasila.

Prodi PPKn Pascasarjana UPI terdapat pada tiga jenjang pendidikan, yakni S1, S2 dan S3. Perbedaannya adalah, apabila pada jenjang S1 lebih memberi penekanan pada penguasaan konsep dasar agar menjadi seseorang yang profesional, maka pada jenjang S2 lebih kepada penguasaan teori dan metodologi keilmuan yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Sedangkan jenjang S3 menekankan pada penerapan teori dan metodologi untuk menghasilkan teori baru. Perkembangan kajian kurikulum prodi PPKn Pascasarjana UPI diarahkan kepada penguasaan teori, oleh karena itu mata kuliah yang dikembangkan lebih bersifat teoritis untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi ahli dan ilmuwan dalam bidang PPKn. Dalam rangka pengembangan kajian keilmuan, prodi ini memiliki dua tugas utama yakni mengembangkan profesionalisme untuk menghasilkan calon pendidik profesional dan mengembangkan keilmuan PPKn melalui riset dan publikasi. Menurut Prof. Sapriya, PPKn memiliki empat dimensi utama, antara lain: dimensi kurikuler, dimensi sosial kultural, dimensi kajian ilmiah, dan dimensi birokrasi. Pengembangan keilmuan PPKn pada dasarnya sudah terdapat di dalam dimensi kajian ilmiah atau akademik. Sebagai sebuah disiplin ilmu, syarat yang harus terpenuhi yakni adanya komunitas ahli (*community of scholar*), *body of speaking/writing*, dan tempat/forum sebagai tempat komunitas ahli melakukan penelitian dan publikasi. Oleh karena itu, Program studi (prodi) sebagai tempat pengembangan keilmuan perlu di back up oleh sebuah asosiasi profesi dan harus menjadi satu kesatuan dalam mengembangkan keilmuan, terutama dalam menyelenggarakan seminar atau konferensi.

Kajian keilmuan PPKn merupakan kajian yang bersifat multidisiplin, karena dapat sebagai pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan konstitusi, dan pendidikan karakter. Arah atau fokus dalam pengembangan kajian keilmuan PPKn ini adalah disiplin ilmu yang dapat digunakan untuk membangun dan membentuk warga negara yang baik dan cerdas, antara lain: sejarah dan nilai. Kemudian, terdapat pembagian komposisi atau proporsi untuk mata kuliah praktik maupun mata kuliah teori yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau tuntutan akademik. Akan tetapi, untuk komposisi mata kuliah yang bersifat inti yang menjadi ciri PPKn atau institusional perlu disepakati melalui asosiasi atau forum prodi dan berdasarkan pada kebijakan institusi. Kajian inti PPKn selama ini dekat dengan ideologi negara Pancasila, UUD/konstitusi, kondisi riil masyarakat Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika/beragam, kebangsaan/NKRI. Walaupun demikian, kajian PPKn di UPI harus memiliki ciri khas khusus yang membedakan dengan kajian PPKn yang terdapat pada institusi pendidikan lain. Yang harus disepakati ialah dalam bingkai NKRI, penentuan mata kuliah inti prodi PPKn se-Indonesia seharusnya sama, sebagai contoh mata kuliah Filsafat Ilmu. Kemudian untuk mata kuliah bidang keahlian prodi, mata kuliah yang harus ada ialah mata kuliah yang ada kaitannya dengan ideologi bangsa, konstitusi, ke-Indonesiaan yang menunjukkan keragaman, kewilayahan. Selain itu, harus ada juga mata kuliah yang dapat memberikan wawasan global kepada mahasiswa.

Prof. Sapriya mengutarakan bahwa bangsa Indonesia tidak dapat menjadi sebuah bangsa yang eksklusif karena secara geografis berada pada silang dua benua dan dua samudra. Posisi yang sangat strategis ini sangat memungkinkan Indonesia tidak dapat steril maupun bebas dari pengaruh perkembangan global/internasional. Hal ini akan mempengaruhi kurikulum yang sedang dikembangkan. Pengaruh yang dimaksud meliputi perkembangan Iptek dan pengaruh pemerintah yang dirasa sangat kental. Kurikulum PPKn harus dapat mengikuti perkembangan internasional dan mengantisipasi perkembangan PPKn yang terdapat di negara lain. Pada abad 21 ini, konsep-konsep keterampilan abad 21 harus diadopsi dan dimanfaatkan agar menjadi bagian dari kurikulum PPKn. Perkembangan teknologi juga harus dapat digunakan untuk mencapai tujuan PPKn yang berorientasi pada kepentingan nasional.

B. Karakteristik Pengembangan Kajian

No.	Aspek Kajian	UPI Bandung	UNS Surakarta	UM Malang
1	Visi	Menjadi program studi pelopor dan unggul dalam menghasilkan ahli pendidikan kewarganegaraan yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air (patriotik), dan Pancasilais.	Menjadi pusat pengembangan ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan yang bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya luhur nasional.	Mewujudkan Program Studi S2 pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang UNGGUL dan menjadi RUJUKAN dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian serta penerapan ilmu dan teknologi dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesuai kebutuhan pembangunan karakter bangsa pada tahun 2025.
2	Misi	<p>1) Menyelenggarakan pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor Pendidikan Kewarganegaraan yang berorientasi pada penguasaan pengetahuan ilmu kewarganegaraan, politik, hukum, ekonomi, kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa, nilai, moral, budaya dan filsafat Pancasila, dan riset selaras dengan perkembangan kehidupan sosial dan politik nasional dan global.</p> <p>2). Melakukan kajian terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan RI, dan</p>	<p>1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif berdasarkan perkembangan mutakhir di bidang PKn;</p> <p>2) Menyelenggarakan penelitian, kajian akademik, dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang ilmu Pancasila, ilmu kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan;</p> <p>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang ilmu Pancasila, ilmu kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan; dan</p>	<p>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional berkualitas dalam bidang PPKn;</p> <p>2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang PPKn;</p> <p>3. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat melalui ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang PPKn;</p> <p>4. Mengembangkan jaringan kerjasama kelembagaan</p>

No.	Aspek Kajian	UPI Bandung	UNS Surakarta	UM Malang
		<p>Bhinneka Tunggal Ika dengan permasalahannya menggunakan pendekatan inter-, multi, dan transdisipliner.</p> <p>3) Melakukan kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu terintegrasi synthetic discipline, atau pendidikan disiplin ilmu dan aplikasinya untuk pengembangan keahlian dalam bidang PKn.</p> <p>4) Membangun kerjasama dan jejaring dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor Pendidikan Kewarganegaraan agar dapat berperan dan berkembang sebagai tenaga ahli atau akademisi yang berkemampuan memecahkan masalah pendidikan kewarganegaraan yang kompleks melalui pendekatan inter-, multi, dan transdisipliner.</p> <p>5) Menyelenggarakan pelatihan, penataran, dan pelayanan konsultasi program-program PKn bagi masyarakat.</p>	<p>4) Melakukan kerjasama dengan lembaga akademik dan profesi pada tingkat nasional dan internasional guna menunjang pengembangan ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan.</p>	<p>dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja prodi PPKn;</p> <p>5. Menyelenggarakan organisasi tata kelola organisasi yang transparan; demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan.</p>

No.	Aspek Kajian	UPI Bandung	UNS Surakarta	UM Malang
3	Tujuan		<ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan magister bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang memiliki kemampuan menyelenggarakan pembelajaran bidang PKn di institusi pendidikan sebagai aktualisasi dari PKn dimensi program kurikuler; 2) Menghasilkan lulusan magister bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang memiliki kemampuan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan akademik ilmiah lainnya pada bidang PKn sebagai aktualisasi dari PKn dimensi program akademik; 3) Menghasilkan lulusan magister bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang memiliki kemampuan memberdayakan anggota masyarakat untuk berpartisipasi sebagai warga negara Indonesia yang cerdas dan berkarakter sebagai aktualisasi dari PKn dimensi program kemasyarakatan; dan 4) Menghasilkan produk ilmiah akademik hasil kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat 	<p>Menghasilkan tenaga pendidik bidang PPKn melalui pengalaman belajar yang membekali dengan rasa keimnanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran tinggi sebagai warga negara yang berkepribadian Pancasila, serta kemampuan profesional dalam menjalankan amanah sebagai pendidik, peneliti dan pengembang bidang PPKn.</p>

No.	Aspek Kajian	UPI Bandung	UNS Surakarta	UM Malang
			pada bidang pengkajian Pancasila, ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan.	
4	Standar Kompetensi Lulusan	<p>Program S2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memecahkan masalah ilmu pengetahuan dan pendidikan yang kompleks tentang kewarganegaraan, politik, hukum, ekonomi, kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa, nilai, moral, budaya dan filsafat Pancasila melalui pendekatan secara inter-, dan multidisipliner dicirikan dengan dihasilkannya karya yang berpotensi untuk dipublikasikan dalam memecahkan masalah-masalah tersebut. 2. Mampu mengembangkan kemanfaatan keilmuan pendidikan kewarganegaraan untuk diaplikasikan pada lingkup yang lebih luas. 3. Mampu melakukan pendalaman dan perluasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; 2) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; dan 3) Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki kemampuan merancang rencana pembelajaran untuk pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan perkembangan substansi dan nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan karakter. 2. memiliki kemampuan mengembangkan substansi pembelajaran PPKn secara tepat dan mendalam sesuai dengan keilmuan yang relevan. 3. Memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran PPKn dengan mendayagunakan model dan bahan pembelajaran secara aktif, efektif, efisien dan menarik. 4. Memiliki kemampuan melaksanakan evaluasi pembelajaran PPKn secara berkesinambungan menggunakan instrumen yang mampu mengungkap

No.	Aspek Kajian	UPI Bandung	UNS Surakarta	UM Malang
		<p>keilmuan pendidikan kewarganegaraan dengan menghasilkan model, metode, dan pengembangan teori yang akurat, teruji, inovatif, sauntifik, dan dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional.</p> <p>4. Mampu berkontribusi dalam merencanakan sebuah peta jalan (<i>road map</i>) atau “payung penelitian” dalam pendidikan kewarganegaraan dan/atau riset dan pengembangan dalam keilmuannya melalui pendekatan secara inter-, dan multidisipliner.</p> <p>5. Mampu memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan kelompok kerja yang bertugas untuk memecahkan masalah pendidikan kewarganegaraan yang kompleks pada bidang tertentu atau mengelola</p>		<p>ketercapaian pendidikan karakter sebagai hasil belajar.</p> <p>5. Memiliki kemampuan melaksanakan penelitian untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran PPKn.</p>

No.	Aspek Kajian	UPI Bandung	UNS Surakarta	UM Malang
		<p>pendidikan kewarganegaraan sebagai laboratorium demokrasi.</p> <p>6. Mampu mengelola riset dan evaluasi atas pelaksanaan program yang berada di bawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan keilmuan pendidikan kewarganegaraan guna menghasilkan langkah-langkah strategis bagi pengembangan organisasi.</p>		
5.	Sasaran Program			<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan Program S1 PPKn 2. Guru-gur PPKn jenjang pendidikan dasar dan menengah. 3. Dosen-doesn matakuliah Pancasila dan PKn Perguruan tinggi negeri/swasta. 4. Staf, pegawai, karyawan, atau tenaga fungsional pada instansi pemerintah/swasta
6.	Struktur Kurikulum	<p>Matakuliah Landasan Keahlian: Metede Penelitian; Statistika Terapan</p> <p>Matakuliah Keahlian SPs:</p>	<p>Mata Kuliah Dasar: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Teori Kewarganegaraan, Hukum dan Konstitusi, dan Teori Dan Landasan PKn.</p>	<p>Matakuliah Pascasarjana: Landasan Pendidikan dan Pembelajaran; Metede Penelitian Kuantitatif; Metode Penelitian Kualitatif*); Metode Penelitian Pengembangan*); Metode</p>

No.	Aspek Kajian	UPI Bandung	UNS Surakarta	UM Malang
		<p>Filsafat Ilmu; Landasan Pedagogik</p> <p>Matakuliah Keahlian Prodi: Teori dan Landasan PKn; Teori Pendidikan Politik; Teori Pendidikan Hukum; Teori Pendidikan Nilai; Pendidikan AntarKebudayaan; Teori dan Pengembangan Kurikulum PKn; Filsafat Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p> <p>Matakuliah Pilihan Keahlian Khusus: Filsafat dan Teori Hukum; Filsafat dan Teori Politik; Perbandingan Sistem Politik; Perbandingan Civic; Metode Penelitian Kualitatif; Sistem Sosial Budaya Indonesia; Etnopedagogi PKn; Inovasi Pembelajaran PKn; Kajian Teori dan Aplikasi Pendidikan Karakter; Sejarah Perjuangan Bangsa; Prinsip dan Nilai Kemanusiaan dan HAM; Pendidikan Politik Generasi Muda; Teori dan Model-model Pembelajaran PKn; Analisa Kebijakan Publik; Seminar Pengembangan Proposal Tesis.</p>	<p>Mata Kuliah Bidang Keahlian: Sistem Demokrasi, Perbandingan Hukum Kewarganegaran, Kewarganegaraan Multikultural, PKn kurikuler, PKn Kemasyarakatan, Pendidikan Moral, Inovasi Pendidikan, PKn Perspektif Internasional, Pendidikan Politik, Tesis I (Seminar dan Ujian Proposal), Tesis II (Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi), Tesis III (Seminar Hasil Riset dan Karya Publikasi), dan Tesis IV (Ujian Tesis).</p> <p>Mata Kuliah Pilihan: Ekonomi Pancasila, Etika Politik, Pancasila dan Ideologi Politik Kontemporer, Ekologi Kewarganegaraan, Perkembangan HAM, dan Kewarganegaraan Digital.</p>	<p>Penelitian Tindakan*); Statistika Inferensial*)</p> <p>Matakuliah Program Studi: PPKn dalam Kerangka Pendidikan Nasional; Kajian Kurikulum dan Pengembangan Bhan Ajar PPKn; Pembelajaran Inovatif dan Pengembangan Bahan Ajar PPKn; Pembelajaran Inovatif dan Pengembangan Media PPKn; Assesment dan Evaluasi Pembelajaran PPKn; Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter Bangsa; Filsafat Pancasila; UUD NRI Tahun 1945, dan Sistem Ketatanegaraan RI; Studi demokrasi, HAM dan Civil Society; Kearifan Lokal dan Strategi Kebudayaan Nasional; Sistem Pembangunan Nasional*); Studi Masyarakat Multikultural Indonesia*); Politik Hukum dan Perundang-undangan*); Pemerintahan dan Kebijakan Publik*).</p> <p>Matakuliah kelompok Pengalaman Lapangan:</p>

No.	Aspek Kajian	UPI Bandung	UNS Surakarta	UM Malang
		Matakuliah Keahlian Khusus: Tesis		Kuliah dan Praktek Pengalaman Lapangan Matakuliah Kelompok Tesis: Seminar Usulan Tesis; Tesis Tanda *) termasuk matakuliah pilihan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kajian keilmuan pendidikan kewarganegaraan baik dalam nomenklatur Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) maupun Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di program pascasarjana di perguruan tinggi di Indonesia terdapat perbedaan dan persamaan penyelenggaraan. *Persamaan* yang khas yakni bahwa kajian dilakukan untuk menghasilkan lulusan program magister/doktor sesuai dengan visi, misi dan tujuan penyelenggaraannya dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). *Perbedaan* tampak dalam penyelenggaraan kajian keilmuan pendidikan kewarganegaraan karena faktor sejarah pembukaan prodi, karakteristik awal perguruan tinggi, ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana program pendidikan pascasarjana.
2. Pengembangan kompetensi lulusan bercorak akademik dan sejalan tuntutan kebutuhan lapangan kerja serta dunia keilmuan kontemporer.

B. Saran

Perlu penyamaan pemahaman dan kebijakan tentang paradigma kajian dan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Pascasarjana di pendidikan tinggi, yang difasilitasi oleh forum program studi atau asosiasi profesi PPKn Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cogan, John J. 1998. "Citizenship Education for the 21st Century: Setting the Context," dalam John J. Cogan dan Ray Derricott, *Citizenship for the 21st Century: An Introduction Perspectives on Education*, London: Kogan Page Ltd, pp.1-20.
- Dawson, R. E., Prewitt, K., dan Dawson, K. S. (1977). *Political Socialization*. 2nd edition. Boston and Toronto: Little Brown and Co.
- Patrick, John. J. (1999). "Education for Constructive Engagement of Citizens in Democratic Civil Society and Government," dalam Charles F. Bahmueller dan John J. Patrick, *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship: International Perspectives and Project*, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education and the ERIC Adjunct Clearinghouse for International Civic Education in association with Civitas., pp.41-60
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. (2014). Usulan Pembukaan Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Samsuri. (2010.) *Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi)*. Program Studi Pendidikan IPS. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- Samsuri. (2011). "Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia." *Cakrawala Pendidikan*. Vol. XXX, No. 2, pp. 267-281.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Veldhuis, R. (1997). "Education for Democratic Citizenship: Dimensions of Citizenship, Core Competencies, Variables, and International Activities," makalah disajikan di *Council for Cultural Cooperation*, F-67075 Strasbourg Cedex, Perancis, 25 November.

A. INSTRUMEN PENELITIAN

B. PERSONALIA TIM PENELITIAN

Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana dan Pembagian Tugas

No.	Nama, NIP, NIDN NIM	Asal Institusi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/ Minggu)	Tugas
1	Dr. Samsuri, M.Ag. 197206192002121001	Prodi PPKn PPs UNY	Pendidikan Kewarga- negara	10 jam/ minggu	Bertanggungjawab atas seluruh proses pelaksanaan penelitian Tugas utama: 1. Melakukan koordinasi jalannya pelaksanaan penelitian 2. Membuat instrumen penelitian dan menyeminarkan proposal penelitian 3. Melakukan monitoring terhadap jalannya penelitian 4. Menyeminarkan hasil penelitian 5. Melakukan evaluasi dan revisi terhadap hasil penelitian
2	Dr. Suharno, M.Si. 19680417120000310 01	Prodi PPKn PPs UNY	Kebijakan Publik	8 jam/ minggu	Bersama-sama tim melaksanakan penelitian dengan optimal Tugas utama: 1. Membantu pelaksanaan penelitian. 2. Membantu pembuatan proposal dan seminar instrumen penelitian 3. Memberikan masukan dan koreksi terhadap pelaksanaan penelitian 4. Membantu menyeminarkan laporan dan merevisi hasil penelitian 5. Membangun kerjasama tim (<i>teamwork</i>) dengan baik.

No.	Nama, NIP, NIDN NIM	Asal Institusi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/ Minggu)	Tugas
3	Dr. Mukhamad Murdiono, S.Pd., M.Pd 19780630 200312 1 002	Prodi PPKn PPs UNY	SBM PPKn	8 jam/ minggu	Bersama-sama tim melaksanakan penelitian dengan optimal Tugas utama: 1. Membantu pelaksanaan penelitian. 2. Membantu pembuatan proposal dan seminar instrumen penelitian 3. Memberikan masukan dan koreksi terhadap pelaksanaan penelitian 4. Membantu menyeminarkan laporan dan merevisi hasil penelitian 5. Membangun kerjasama tim (<i>teamwork</i>) dengan baik.
4	R Samidi, S.Pd. 17730251001	Prodi PPKn PPs UNY	PPKn	4 jam/ minggu	1. Membantu pelaksanaan penelitian. 2. Merancang penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir tesis.
5	Verbena Ayuningsih Purbasari, S.Pd. 17730251015	Prodi PPKn PPs UNY	PPKn	4 jam/ minggu	1. Membantu pelaksanaan penelitian. 2. Merancang penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir tesis.

10. LAMPIRAN

Tim Pengusul

1. Biodata Ketua Peneliti:

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Samsuri, S.Pd., M.Ag.
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP	197206192002121001
5	NIDN	0019067206

6	Tempat, Tanggal Lahir	Haurgeulis, 19 Juni 1972
7	E-mail	samsuri@uny.ac.id
8	No. Telepon/ HP	081805950338
9	Alamat Kantor	Jurusan PKn dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281
10	Nomor Telepon/Faks	0274-586168 ext. 1595/0274-548201
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 26 orang, S2= 16 orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pendidikan Kewarganegaraan (S1)
		2. Pendidikan Pancasila (S1)
		3. Dasar-dasar Pendidikan Moral (S1)
		4. Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan (S1)
		5. Moral Agama (S1)
		6. Teori dan Prinsip PKN (S2)
		7. PKN Perspektif Internasional (S2)
		8. Proposal Tesis (S2)
		9. Seminar Isu Kontemporer PKn (S2)

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama PT	IKIP Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
Bidang Ilmu	Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan	Studi Islam Konsentrasi Pendidikan Islam	Pendidikan IPS Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan
Tahun Masuk-Lulus	1991-1997	1998-2000	2006-2010
Judul Tugas Akhir	Studi Penyelesaian Perang Sipil di Bosnia-Hercegovina (1992-1996)	Perjuangan Masyumi Menghadapi Komunisme Pada Era Demokrasi Liberal (1950-1957): Suatu Kajian Pendidikan Politik	Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (<i>Civil Society</i>) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi).
Nama Pembimbing/ Promotor	1.Drs. Ekram Pawiroputro, M.Pd. 2.Drs. Mudjono	Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A.	1. Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H. 2. Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A. 3. Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan
-----	-------	------------------	-----------

			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2016-2018	PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN BERBASIS NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR DI SEKOLAH (Ketua)	Kemenristekdikti	283
2.	2015	Pembinaan Karakter Kewargaan Multikultural Berbasis Pilar-Pilar Kebangsaan di Madrasah Aliyah Se-Daerah Istimewa Yogyakarta (Ketua). Tahun Kedua	Dikti	50
3.	2014	Pembinaan Karakter Kewargaan Multikultural Berbasis Pilar-Pilar Kebangsaan di Madrasah Aliyah Se-Daerah Istimewa Yogyakarta (Ketua). Tahun Pertama	BOPTN Dikti	50
4.	2013	Pengembangan Model <i>Peace-Building Teaching and Learning</i> : Intervensi Pencegahan Kekerasan Melalui Pendidikan Formal (anggota)	Stranas Dikti	75
5.	2013	PENGEMBANGAN MODEL RESOLUSI KONFLIK UNTUK MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI POSO DAN AMBON (Studi Implementasi Kebijakan Resolusi Konflik di Sampit, Kotim, Kalimantan Tengah) (anggota)	BOPTN Dikti	50
6.	2013	Model Kebijakan Penanggulangan Korupsi di Universitas Negeri Yogyakarta (anggota)	BOPTN Unggulan PT	45
7.	2013	Pembinaan Karakter Siswa dan Mahasiswa Islam melalui Kegiatan Akademik: Studi di MAN 1 Yogyakarta dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (Penelitian kelompok FIS) (Anggota).	DIPA UNY	10
8.	2012	Penggunaan Sumber Kepustakaan dalam Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Jurusan PKn dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta	DIPA UNY	15
9.	2011	Pembinaan Karakter Siswa Berbasis Pendidikan Agama di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahap 2). (Anggota).	DIPA UNY	50

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2016	Pengembangan Kemampuan Menulis Artikel Ilmiah Berbasis Penelitian di Jurnal untuk Guru PKN SMP/MTs Se-Kabupaten Magelang (Anggota).	DIPA PPS UNY	10

2.	2014	Pengembangan Kemampuan Menulis Artikel Ilmiah Berbasis Penelitian di Jurnal untuk Guru PKN SMP/MTs Se-Kota Yogyakarta (Anggota).	DIPA FIS UNY	5
3.	2013	Pelatihan E-learning Berbasis Blog bagi Guru-guru Pkn SMP Se-Kabupaten Bantul DIY	DIPA FIS UNY	5
4.	2012	Pengembangan Kemampuan Menulis Artikel Ilmiah Berbasis Penelitian di Jurnal untuk Guru PKN SMP/MTs Se-Kabupaten Sleman (Anggota).	DIPA FIS UNY	5
5	2011	Pengembangan Kemampuan Menulis Artikel Ilmiah Berbasis Penelitian di Jurnal untuk Guru PKN SMP/MTs Se-Kabupaten Bantul	DIPA FISE UNY	5

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/ Tahun
1.	Pembentukan Karakter Kewargaan Multikultural dalam Program Kurikuler di Madrasah Aliyah Se-Daerah Istimewa Yogyakarta (bersama Marzuki)	Cakrawala Pendidikan	XXXV/1/ 2016
2.	Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Konstruktivistik Berbantuan Media Pembelajaran (bersama Yusri)	Jurnal Harmoni Sosial	1/2/2014
3.	Model Kebijakan Penanggulangan Korupsi di Universitas Negeri Yogyakarta (bersama Anang Priyanto dan M. Lies Endarwati)	Jurnal Penelitian Humaniora	19/1/2014
4	THE HUMAN RIGHTS AND CIVIC EDUCATION POLICY AFTER THE CONSTITUTION AMENDMENT IN INDONESIA	MILLAH JURNAL STUDI AGAMA	XII/1/2012
5	Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia (bersama Marzuki, dan M. Murdiono)	CAKRAWALA PENDIDIKAN	XXX/2/ 2011
6	Pembinaan Karakter Siswa Berbasis Pendidikan Agama DI SD dan SMP DIY	JURNAL KEPENDIDIKAN	41/1/2011
7	<i>Transforming Islamic Values Into Civic Education (A Preliminary Study in the Islamic Higher Education Institutions in Indonesia)</i>	MILLAH JURNAL STUDI AGAMA	IX/2/2010

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	International Seminar AP3KNI – UPI Bandung	Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraa Pada Masyarakat Multikultural Berbasis Nilai-Nilai	Bandung, 15-16 November 2016

		Kebangsaan dan Kearifan Lokal di Sekolah	
2	The 10th Anniversary APNME Conference, University of Sydney, Australia	Islamic Values within the Context of Multicultural Citizenship in Madrasah Aliyah, Yogyakarta, Indonesia	Sydney, 4-7 Desember 2015
3	<i>The Commemorative Academic Conference for the 60th Anniversary of the 1955 Asian-African Conference in Bandung</i>	'Spirit of Bandung' and Self-determination Right of a Nation in Indonesian Civic Education Context	Bandung, 4 th -6 th June 2015
4	Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional AP3KNI, Bandung, 5 April 2015	Reposisi Hak Asasi Manusia dalam Kajian Kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia	UPI Bandung, 4 April 2015
5	<i>The 3rd International Conference on Multidisciplinary Research</i> , Jointly organized by UISU Medan, Unsyiah Kuala Aceh and Universiti Sains Malaya Penang	Islam and National Identities: The Multicultural Citizenship Character in the Islamic High Senior Schools (<i>Madrasah Aliyah</i>) in Yogyakarta, Indonesia (bersama Dr. Marzuki, M.Ag.)	Medan, 16 Oktober 2014.
6	<i>The APNME 8th Annual Conference</i>	Creating good citizen through moral education in the Indonesian context	Yogyakarta, June 29, 2013
7	Seminar Nasional "Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Guna Melahirkan Pemimpin Yang Visioner" Himpunan Mahasiswa Program Studi PPKn Civics IKIP PGRI Madiun	Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila: Membangun Kenegarawan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan	Madiun, 6 Januari 2013
8	Kuliah Umum di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta	Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013	Yogyakarta, 15 September 2013.
9	Seminar Nasional "Menyongsong Kurikulum Nasional"	KURIKULUM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN : Dari Politik Rezim ke Politik Negara untuk Membangun Warga Negara Ideal	IKAPI, Jakarta, 29 Oktober 2012.
10	Seminar Nasional Revitalisasi Pendidikan Karakter Menuju Progresivitas Pendidikan Nasional Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Pendidikan Karakter: Menyemai Moralitas Agama dan Kenegarawan	Purwokerto, 14 Mei 2011.

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Dasar-dasar Pendidikan Moral: Basis Pengembangan Pendidikan Karakter (Bersama Drs. Muchson AR., M.Pd) (ISBN 9-78-602-258-036-2)	2013	x+126	Penerbit Ombak, Yogyakarta
2.	Pendidikan Karakter Warga Negara (ISBN 978-602-8658-75-1)	2012	vii+98	Pustaka Hanif Surakarta
3.	<i>Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Membangun Karakter Warga Negara Demokratis.</i> Dalam Darmiyati Zuchdi (ed.). PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK. UNY PRESS, pp. 356-383. ISBN 978-979-8418-63-1	2011		UNY Press, Yogyakarta

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

I. Pengalaman merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Penelitian Instiusional PPS UNY Tahun 2018.

Yogyakarta, 29 Maret 2018

Pengusul,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Samsuri', written on a light blue rectangular background.

(Dr. Samsuri, S.Pd., M.Ag.)

NIP. 19720619 200212 1 001

Biodata Anggota 1 Tim Pengusul

A. Identitas Diri

1	Nama lengkap	Dr. Suharno, M.Si.	L/P
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala	
3	Jabatan Struktural	----	
4	NIP	19680417 200003 1 001	
5	NIDN	0017046807	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 17 April 1968	
7	Alamat Rumah	Jl.Kaper Nitikan UH VI/337 Yogyakarta	
8	Nomor Telepon	(0274) 8296337 / HP : 0813139494 Faks : -	
9	Alamat Kantor	Karangmalang, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta	
10	Nomor Telepon	(0274) 548202/ Fax (0274) 548201	
11	Alamat E-mail	Suharno@uny.ac.id	
12	Lulusan yang dihasilkan	S1 : 36 orang S2: 18 orang	
13	Mata Kuliah yang diampu	1. Kebijakan Publik	
		2. Pendidikan Multikultur	
		3. Konsep Dasar PKn	
		4. Sistem Politik Indonesia	
		5. Pendidikan Kewarganegaraan	
		6. Sosiologi Politik	

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	IKIP Yogyakarta	Universitas Gadjah Mada	Universitas Gadjah Mada
Bidang Ilmu	PMP dan KN	Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Administrasi Negara
Tahun Masuk-Lulus	1988-1994	Lulus 2002	Lulus 2011
Judul Skripsi/Thesis/ Disertasi	Hubungan Sikap Mental dan Usaha Kepala Kelurahan Se-Kotamadya Surakarta dengan Keberhasilan Meraih Adipura Kencana	Perencanaan Wilayah Kabupaten Bantul dalam Menyongsong Wacana Perkampungan Islam Internasional	Politik Rekognisi dalam Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Konflik di dalam Masyarakat Multikultural
Nama Pembimbing/ Promotor	Ekram Pw.,M.Pd & M. Subardi.,M.Pd	Prof. Dr. Agus Dwiyanto dan Ambar Teguh, M.Si.	Prof. Dr. Warsito Utomo, Dr. Samudra Wibawa

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber *	Jumlah (Juta Rp)

1	2006	Identitas Nasional dan Identitas Etnis Mahasiswa di Asrama-Asrama Berbasis Suku di DIY	DIPA FIS UNY	5
2	2006	Kualitas Pelayanan Publik Pasca Keputusan Men Pan No KEP/M.PAN/2/2004 di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta	SP4	5
3	2006	Tracer Study Lulusan Jurusan PPKn Tahun 2001-2005 tgl. 14-26 Agustus 2006 di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo, Kota Yogyakarta Prop DIY dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen Prop. Jawa Tengah	SP4	5
4	2007	Peran Perempuan dalam Bidang Politik; Studi pada Zaman Khulafaur Rasyidin	DIPA FIS UNY	5
5	2009	Implementasi Konvensi Anti Diskriminasi Perempuan dalam Politik Hukum Indonesia	DIPA FIS UNY	7,5
6	2011	Sikap Mahasiswa FIS dalam Ujian Semester	DIPA FIS UNY	7,5
7	2012	Penuntasan Resolusi Konflik Multikultural Di Indonesia (Perbandingan Model Resolusi Konflik Sampit Kotawaringin Timur dengan Ambon Maluku)	DIPA FIS UNY	10
8	2012	Pengembangan Model Peace-Building Teaching and Learning: Intervensi Pencegahan Kekerasan Melalui Pendidikan Formal	Dikti Kemdikbud	75
9	2012	Pengembangan Model Resolusi Konflik untuk Masyarakat Multikultural (Studi Implementasi Kebijakan Resolusi Konflik Di Sampit, Poso dan Ambon)	Dikti Kemdikbud	49
10	2013	Politik Penegakan Hak Asasi Manusia Pada Masa Transisi di Indonesia (Studi atas Perumusan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia)	DIPA FIS UNY	10
11	2015	Penanaman Nilai-Nilai Kemanusiaan Melalui Proyek Pekan Hak Asasi Manusia (Studi atas Pelaksanaan Pekan Hak Asasi Manusia 2012-2014)	DIPA FIS UNY	10
12	2015	Pengembangan Bahan Ajar Good Governance dalam Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas/Sederajat di Daerah Istimewa Yogyakarta	DIPA PPs UNY	15
13	2015	Strategi Penerapan Organizational Learning untuk Membangun Learning Organization di Sekolah Menengah Kejuruan Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran dan Kinerja Organisasi Sekolah	Kementerian Ristekdikti	100
14	2016			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Judul PPM	Pendanaan	
			Sumber *	Jumlah (Juta Rp)
1	2007	Pengembangan Aspek Moral dalam Mata Pelajaran PKN SD	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	
2	2008	Sosialisasi dan Pelatihan untuk Sertifikasi Guru	STIE Nusa Bangsa Kebumen	
3	2009	Lomba Cerdas Cermat UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI Tingkat SLTA di Prop. DIY yang diselenggarakan oleh MPR RI	MPR RI	
4	2010	Pengembangan Mata Pelajaran IPS Terpadu	MGMP IPS Bantul	
5	2010	Lomba Cerdas Cermat UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI Tingkat SLTA di Prop. DIY yang diselenggarakan oleh MPR RI	MPR RI	
6	2011	Pengembangan Laboratorium IPS di Sekolah	FISE UNY	
7	2011	Lomba Cerdas Cermat UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI Tingkat SLTA di Prop. DIY yang diselenggarakan oleh MPR RI	MPR RI	

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Vol/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Konflik, Etnisitas, dan Integrasi Nasional	Desember 2006	CIVICS UNY
2	Identitas Nasional dan Identitas Etnis Mahasiswa di Asrama-Asrama Berbasis Suku di DIY	2007	HUMANIORA UNY
3	Telaah Kritis terhadap Masyarakat Madani (Civil Society)	Desember 2007	CIVICS UNY
4	Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik; Studi pada Zaman Khulafaur Rasyidin	April 2008	Humaniora UNY
5	Revitalisasi Birokrasi Menuju Good Governance	Desember 2008	CIVICS UNY

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional Kebangsaan: Kerjasama FISE- Kedaulatan Rakyat	Membangun Kebangsaan Multikultural dari Bawah	FISE UNY, Oktober 2009

2	Simposium Nasional Ilmuwan Administrasi Negara	Kebijakan Berbasis Politik Rekognisi; Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional	26-27 Maret 2011
3	Kedaulatan Rakyat	Menyoal Kebijakan Ujian Nasional Pendidikan Agama	29 Maret 2011
4	Pelatihan bagi Perangkat Desa se Kabupaten Sleman	Mewujudkan Good Governance Kabupaten Sleman	Pemda Sleman, 14 November 2011
5	Pertemuan Guru di SMPN 2 Depok	Membangun Kepemimpinan yang Santun, Demokratis, Memahami Hak Kewajiban	SMPN 2 Depok, 15 Januari 2012
6	Pembekalan <i>on the job trining</i> bagi Kepala-Kepala Sekolah di Yogyakarta	Kepemimpinan Partisipatoris: untuk pembekalan <i>on the job trining</i> bagi Kepala-Kepala Sekolah di Yogyakarta	Majelis Pendidikan Dasar PWM Yogyakarta, 19 Febr 2012
7	APNME Conference, Sydney	Development of Teaching Materials on Good Governance in Curriculum of Civic Education for Senior High School (A Practical Experience of Yogyakarta, Indonesia)	The University of Sydney, Australia Sydney, 3-7 Desember 2015
8	Asia Future Conference (AFC)	<i>Conflict Resolution and Environmental Preservation through Traditional System of Saniri, Moluccas, Indonesia</i>	<u>Kitakyushu International Conference Center</u> <u>Oktober 2016</u>
9	APNME Conference, Wuhan China	Development of Digital Multiculturalism in Indonesia	<i>21 - 24 April 2017</i> <i>The Central China Normal University, China</i>
10	ICCED	Governance of Local Monarchy Within A National Repo Ublc Government	The Faculty of Social Sciences UNY 4-5 Okt 2017

G. Pengalaman Penulisan Buku

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Hlmn	Penerbit
1	Dasar-Dasar Kebijakan Publik	2008 2014	268	UNY Press Ombak

2	Membangun Kebangsaan Multikultural	2017		UNY Press
---	------------------------------------	------	--	-----------

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2011	Piagam Penghargaan sebagai Juri Nasional LCC UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI	Ketua MPR RI: H. Taufik Kiemas
2010	Piagam Penghargaan sebagai Juri Nasional LCC UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI	Ketua MPR RI: H. Taufik Kiemas
2009	Piagam Penghargaan sebagai ketua KAPASGAMA oleh Ketua Umum KAGAMA	Ketua Kagama: Sri Sultan Hamengku Buwono X
2009	Piagam Penghargaan sebagai Juri Nasional LCC UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI	Ketua MPR RI: H. Taufik Kiemas

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Penelitian Institusional PPS UNY Tahun 2018.

Yogyakarta, 29 Maret 2018

Pengusul,



Dr. Suharno, M.Si

NIP. 19680417 200003 1 001

Biodata Anggota 2 Tim Pengusul

Nama : Dr. Mukhamad Murdiono, M. Pd.
NIP : 19780630 200312 1 002
Tempat dan Tanggal Lahir : Brebes, 30 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Golongan : IV/a
Jabatan Akademik : Lektor Kepala (550)
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial
Alamat : Karangmalang Yogyakarta
Telp./Faks. : (0274) 586168 psw. 384 / (0274) 548201
Alamat Rumah : Suryadiningratan MJ II/726 G. RT.33 RW.09
Telp./Faks : HP. 08156870193
Alamat e-mail : mukhamad_murdiono@uny.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
2003	Sarjana	UNY	PPKn
2006	Magister	UNY	Pendidikan IPS
2014	Doktor	UPI	PKn

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota	Sumber Dana
2007	Penanaman Nilai Moral Kedisiplinan pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	Ketua (Penelitian Mandiri)	DIPA FISE UNY
2008	Peningkatan Kemampuan Mahasiswa dalam Mengkritisi Kebijakan Publik Melalui Penerapan Pembelajaran Berbasis Portofolio	Ketua (Penelitian Kelompok)	DIPA FISE UNY
2008	Strategi Implementasi Nilai-nilai Moral Religius Di Jurusan PKn dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, UNY.	Ketua (Penelitian Program Cendekia,	Lembaga Penelitian (Lemlit) UNY

		Mandiri, dan Bernurani UNY)	
2008	Peningkatan Keterampilan Kewarganegaraan (<i>Civic Skill</i>) Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (<i>Problem Based Learning</i>)	Ketua (Penelitian Pendidikan)	Lembaga Penelitian (Lemlit) UNY
2009	Model Birokrasi Pemerintah Era Otonomi Daerah	Anggota (Penelitian Hibah Strategis Nasional)	DP2M Dikti Depdiknas
2009	Perempuan Dalam Parlemen (Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kota Yogyakarta)	Ketua (Penelitian Kelompok)	DIPA FISE UNY
2010	Pembinaan Karakter Siswa Berbasis Pendidikan Agama di SD dan SMP di DIY	Anggota (Penelitian Unggulan UNY)	Lembaga Penelitian (Lemlit) UNY
2010	Model Tipologi Perubahan dan Pendidikan Multikultural Pesantren Salaf	Anggota (Penelitian Hibah Strategis Nasional)	DP2M Dikti Depdiknas
2010	Bentuk Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta	Ketua (Penelitian Kelompok)	DIPA FISE UNY

KARYA ILMIAH

A. Buku/Bab Buku/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2007	Peran Pendidikan dalam Membangun Moralitas Anggota DPRD	<i>Jurnal INFORMASI</i> Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, UNY, No. 1 Tahun XXXIII, 2007. ISSN 0126-1650
2007	Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII SMP dan MTs	Intan Pariwara, Klaten, Jawa Tengah. ISBN: 979-28-0012-3
2007	Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP dan MTs	Intan Pariwara, Klaten, Jawa Tengah. ISBN: 979-28-0013-4
2007	Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IX SMP dan MTs	Intan Pariwara, Klaten, Jawa Tengah. ISBN: 979-28-0014-X
2008	Peningkatan Keterampilan Kewarganegaraan (<i>Civic Skills</i>) Melalui Penerapan Pembelajaran Kewarganegaraan Berbasis Portofolio	<i>Jurnal HUMANIKA: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum</i> , Vol. 8 No. 1, Maret 2008, ISSN:1412-1271

2008	Pemanfaatan Lingkungan sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	<i>Jurnal Pembelajaran</i> , Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, FIP, UNY. Nomor 2 Vol. 1 Mei 2008, ISSN: 0216-7999
2008	Buku Model Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VII	Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2009	Model Birokrasi Pemerintah Era Otonomi Daerah	<i>Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan</i> Jurusan PKn dan Hukum, FISE, UNY. Volume 6, Nomor 2, Desember 2009, ISSN: 1829-5789.
2010	Peningkatan Keterampilan Kewarganegaraan (<i>Civic Skills</i>) Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah	<i>Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan</i> , Fakultas Ilmu Pendidikan, UNY. Vol. 3 Nomor 1 Maret 2010
2010	Perempuan dalam Parlemen (Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Yogyakarta)	<i>Jurnal Socia</i> , Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, UNY. Vol.7 Nomor 1 Mei 2010.

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2005	Pengawas Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Regional II Lokal Yogyakarta Divisi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
2006	Ceramah tentang Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan Se-Kabupaten Bantul.	SMA Muhammadiyah Bantul
2007	Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kabupaten Kulonprogo	SMP Negeri 1 Wates
2007	Pengawas Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Regional II Lokal Yogyakarta Divisi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	SMK Negeri 2 Yogyakarta
2008	Pelatihan Penggunaan Internet sebagai Media Penelusuran Sumber Pustaka Bagi Guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan Se-Kota Yogyakarta	Laboratorium Internet FISE-Net.

2008	Ceramah Manajemen Organisasi untuk Pengurus OSIS SMA Negeri 1 Prambanan	SMA Negeri 1 Prambanan
2008	Penguji Independen Calon Perangkat (Kaur Pemerintahan) Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Klaten.	Balai Desa Nangsri
2008	Ceramah Manajemen Waktu untuk Penghuni Panti Asuhan Bina Remaja Sleman, Yogyakarta.	Panti Asuhan Bina Remaja Sleman
2009	Penanggung Jawab Ruang Ujian Tulis Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).	SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
2009	Pengawas Ujian Tulis Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Yogyakarta	Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
2008	Instruktur Kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sekolah Dasar, Gelombang 6, Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta, 15-24 Januari	PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta
2008	Instruktur Kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sekolah Dasar, Gelombang 2, Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta, 27 Okt. - 5 Nopember	PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta
2008	Instruktur Kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sekolah Dasar, Gelombang 6, Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 7 - 16 Nopember	PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta
2008	Instruktur Kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sekolah Dasar, Gelombang 10, Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta, 18 – 27 Nopember	PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta
2008	Instruktur Kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sekolah Dasar, Gelombang 14, Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta, 29 Nop.– 8 Desember	PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta
2008	Instruktur Kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sekolah Dasar, Gelombang 18, Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta, 10 – 19 Nopember	PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta
2008	Instruktur Kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sekolah Dasar, Gelombang 22, Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta, 21 – 30 Desember	PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta
2008	Instruktur Kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sekolah Menengah Pertama, Gelombang 5, Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta, 6 – 15 Nopember	LPMP Yogyakarta
2008	Instruktur Kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sekolah Menengah	LPMP Yogyakarta

	Pertama, Gelombang 9, Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta, 17 – 26 Nopember	
2008	Instruktur Kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sekolah Menengah Pertama, Gelombang 13, Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta, 28 Nopember – 7 Desember	LPMP Yogyakarta
2008	Instruktur Kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sekolah Menengah Atas, Gelombang 19, Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta, 11 – 20 Desember	PPPPTK Matematika Yogyakarta
2008	Instruktur Kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sekolah Menengah Atas, Gelombang 23, Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta, 22 – 31 Desember	PPPPTK Matematika Yogyakarta
2009	Instruktur Kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sekolah Menengah Pertama, Gelombang 3, Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta, 17 – 26 Agustus	LPMP Yogyakarta

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Penelitian Instiusional PPS UNY Tahun 2018.

Yogyakarta, 29 Maret 2018

Pengusul,

Dr. Mukhamad Murdiono, M.Pd
NIP. 19780630 200312 1 002